

## Pengaruh Tingkat Pendidikan, Upah Minimum Dan Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Sarolangun

**Muhammad Farhan**

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email : [farhanabenk4@gmail.com](mailto:farhanabenk4@gmail.com)

**Bambang Kurniawan**

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email : [bambangkurniawan@uinjambi.ac.id](mailto:bambangkurniawan@uinjambi.ac.id)

**Ferri Saputra Tanjung**

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email : [ferrisaputratanjung@uinjambi.ac.id](mailto:ferrisaputratanjung@uinjambi.ac.id)

Korespondensi penulis: [farhanabenk4@gmail.com](mailto:farhanabenk4@gmail.com)

**Abstract.** Poverty occurs when a person or group is unable to achieve a level of economic prosperity that is considered the minimum requirement for a certain standard of living. Poverty is born with the limitations of certain people in meeting their needs. The author identifies the problems of this study as follows: Education affects the poverty rate in Sarolangun Regency, Minimum Wage affects the poverty rate in Sarolangun Regency, and open unemployment affects the poverty rate in Sarolangun Regency. Sample determination in quantitative research The total population is 298,091 people, the population is obtained from the total population data of Sarolangun Regency in 2022 Sarolangun Regency. The number used was obtained as a result of calculations with the Yamane formula totaling 100 respondents. The results of the study are (1) education has a positive effect on poverty, (2) minimum wage has a positive effect on poverty (3) open unemployment rate has a positive effect on poverty.

**Keywords:** Education, Minimum Wage, Open Unemployment, Sarolangun

**Abstrak.** Kemiskinan terjadi ketika seseorang atau kelompok tidak dapat mencapai tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimum untuk standar hidup tertentu. Kemiskinan lahir dengan keterbatasan orang-orang tertentu dalam memenuhi kebutuhannya. Penulis memberikan identifikasi masalah dari penelitian ini sebagai berikut: Pendidikan memberikan pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sarolangun, upah Minimum memberikan pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sarolangun, dan pengangguran terbuka memberikan pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sarolangun. Penentuan sampel dalam penelitian kuantitatif Jumlah populasi adalah 298.091 orang, populasi didapatkan dari jumlah data penduduk Kabupaten Sarolangun tahun 2022 Kabupaten Sarolangun. Angka yang digunakan didapatkan adalah hasil dari perhitungan dengan rumus Yamane berjumlah 100 responden. Hasil penelitian yaitu (1) pendidikan berpengaruh positif terhadap kemiskinan, (2) upah minimum berpengaruh positif terhadap kemiskinan (3) tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap kemiskinan.

**Kata Kunci :** Pendidikan, Upah Minimum, Pengangguran Terbuka, Sarolangun

### LATAR BELAKANG

Kemiskinan terjadi ketika seseorang atau kelompok tidak dapat mencapai tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimum untuk standar hidup tertentu. Kemiskinan lahir dengan keterbatasan orang-orang tertentu dalam memenuhi kebutuhannya. Kemiskinan merupakan masalah yang paling kompleks di dunia, terutama di negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar seperti Indonesia. Namun nyatanya, beberapa negara maju telah mampu mengentaskan kemiskinan sedikit demi sedikit. Tentunya

tidak semua orang dapat sejahtera dalam hidup ini, dengan banyaknya permasalahan demi permasalahan yang terjadi.

Kemiskinan yang terjadi di negara berkembang merupakan masalah yang cukup rumit, namun di beberapa negara berkembang telah mencapai keberhasilan dalam hal produksi dan pendapatan nasional. Kondisi kemiskinan suatu negara atau daerah merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggal pada negara atau daerah tersebut. Indonesia adalah negara yang masih digolongkan berkembang, dan kemiskinan merupakan masalah yang menjadi pusat perhatian.

Pengangguran terbuka di Kabupaten Sarolangun pada tahun 2017 sebanyak 3.227 jiwa, pada tahun 2018 sebanyak 5.905 jiwa, pada tahun 2019 sebanyak 5.985 jiwa, pada tahun 2020 sebanyak 8.585 jiwa dan pada tahun 2021 sebanyak 8.010 jiwa dengan jumlah rata-rata penduduk lima tahun terakhir sebanyak 6.342 jiwa. Ini menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi belum bisa menjadi tolak ukur untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan di Provinsi Jambi, karena kenaikan pertumbuhan ekonomi malah di barengi dengan kenaikan angka pengangguran dan kemiskinan.

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Penguasa atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/ atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Upah minimum provinsi ditetapkan dengan keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 21 november tahun berjalan dan dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dengan syarat tertentu selambat-lambatnya pada tanggal 30 november setiap tahunnya. Upah minimum kabupaten/kota ditetapkan setelah penetapan upah minimum provinsi. Upah minimum kabupaten/kota harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi. Upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Penetapan UMP dan UMK tahun 2022 dilaksanakan dengan menggunakan formula upah minimum.

Ketentuan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 35 dikecualikan bagi usaha mikro dan usaha kecil. Upah pada usaha mikro dan usaha kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh diperusahaan dengan ketentuan:

- a) Paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari rata-rata konsumsi masyarakat ditingkat provinsi dan

- b) Nilai upah yang disepakati paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) di atas garis kemiskinan di tingkat provinsi.

Usaha mikro dan usaha kecil yang dikecualikan dari ketentuan upah minimum wajib mempertimbangkan faktor sebagai berikut sesuai pasal 38:

- a. Mengandalkan sumber daya tradisional; dan/atau
- b. Tidak bergerak pada usaha berteknologi tinggi dan tidak padat modal.

Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan. Tercapainya peningkatan pembangunan manusia terlihat dari penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak), peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat serta meningkatkan Pendidikan. Artipenting manusia dalam pembangunan adalah manusia dipandang sebagai subyek pembangunan yang artinya pembangunan dilakukan memang bertujuan untuk kepentingan manusia atau masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata, maka pembangunan suatu negara dapat diarahkan pada tiga hal pokok yaitu meningkatkan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok bagi masyarakat, meningkatkan standar hidup masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses baik kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosial dalam kehidupannya.

Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi sebesar 4,6%, tingkat kemiskinan sebesar 25,61%, dan indeks pembangunan manusia sebesar 69,03%, pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi sebesar 4,99%, tingkat kemiskinan sebesar 25,70%, dan indeks pembangunan manusia sebesar 69,41%, pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,08%, tingkat kemiskinan sebesar 25,39%, dan indeks pembangunan manusia sebesar 69,72%, pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi sebesar 8,42%, tingkat kemiskinan sebesar 26,79%, dan indeks pembangunan manusia sebesar 69,98%, dan pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi sebesar 8,87%, tingkat kemiskinan sebesar 27,06%, dan indeks pembangunan manusia sebesar 70,25%. Indeks pembangunan manusia mengalami peningkatan yang cukup berarti dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan indeks pembangunan manusia dapat diduga telah dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Peningkatan laju indeks pembangunan manusia tidak sama dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pengangguran adalah masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan yang paling berat. Kebanyakan orang kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan rekanan psikologis. Jadi tidaklah mengejutkan jika pengangguran menjadi

topik yang sering dibicarakan dalam perdebatan politik dan para politis sering mengklaim bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu menciptakan lapangan kerja.

Data kemiskinan kabupaten Sarolangun berdasarkan indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2019 sebesar 1.17%, pada tahun 2020 sebesar 1.08%, dan pada tahun 2021 sebesar 1.13%, data kemiskinan kabupaten Sarolangun berdasarkan persentase penduduk miskin pada tahun 2019 sebesar 8.45, pada tahun 2020 sebesar 8.42, dan pada tahun 2021 sebesar 8.87, data kemiskinan kabupaten Sarolangun berdasarkan jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 sebesar 25.39 ribu jiwa, pada tahun 2020 sebesar 25.79 ribu jiwa, dan pada tahun 2021 sebesar 27.06 ribu jiwa, data kemiskinan kabupaten Sarolangun berdasarkan indeks keparahan kemiskinan pada tahun 2019 sebesar 0.39, pada tahun 2020 sebesar 0.27, dan pada tahun 2021 sebesar 0.21, data kemiskinan kabupaten Sarolangun berdasarkan jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 sebesar 25.39 ribu jiwa, pada tahun 2020 sebesar 25.79 ribu jiwa, dan pada tahun 2021 sebesar 27.06 ribu jiwa, data kemiskinan kabupaten Sarolangun berdasarkan gini risio pada tahun 2019 sebesar 0.27, pada tahun 2020 sebesar 0.31, dan pada tahun 2021 sebesar 0.32.

Data pendidikan penduduk Kabupaten Sarolangun pada tahun 2019 jumlah penduduk sebanyak 61.337 orang dengan kategori Diploma I, II, III sebanyak 465 orang dengan jumlah persentase 0.76% dan kategori Sarjana/Doktor sebanyak 2510 orang dengan jumlah persentase 4.09%, sedangkan pada tahun 2020 jumlah penduduk sebanyak 62.956 orang dengan kategori Diploma I, II, III sebanyak 907 orang dengan jumlah persentase 1.44% dan kategori Sarjana/Doktor sebanyak 2.520 orang dengan jumlah persentase 4.00% dan pada tahun 2021 jumlah penduduk sebanyak 62.956 orang kategori Diploma I, II, III sebanyak 940 orang dengan jumlah persentase 1.49% dan kategori Sarjana/Doktor sebanyak 2578 orang dengan jumlah persentase 4.09%. mengenai upah minimum kabupaten Sarolangun pada tahun 2019 sebanyak Rp. 2.038.179, pada tahun 2020 sebanyak Rp. 1.941.793 dan pada tahun 2021 sebanyak Rp. 2.257.112.

Beberapa fenomena kesimpulan akhir yang terjadi mengenai penduduk miskin di Kabupaten Sarolangun yaitu:

Tingkat pendidikan di Kabupaten Sarolangun masih tergolong rendah di tahun 2018. Data dari Bappeda Sarolangun menunjukkan hanya berkisar 60%. Masa sekolah di Sarolangun rata-rata hanya 7,34 tahun atau hanya sampai kelas 2 SMP. Rendahnya angka pendidikan di Sarolangun menurut Cek Endra bukan dikarenakan faktor ekonomi melainkan disebabkan minimnya pengertian soal pentingnya pendidikan di masyarakat Sarolangun. Sedangkan fenomena di tahun 2022 mengenai pendidikan di Kabupaten Sarolangun bisa dikatakan

pendidikan di sarolangun sekarang sudah lebih baik, terlebih dengan hadirnya teknologi yang semakin canggih dan siswa siswi sudah lebih efektif dan efisien dalam dunia Pendidikan. Di era kolaborasi Seperti ini memang tidak terlalu pas menggunakan tipe kepemimpinan Superior dan non demokratis tetapi jenis leader yang bisa mengkombinasikan semua pihak demi terwujudnya masyarakat adil Makmur, langsung nya dari problematika Pendidikan tadi kabupaten sarolangun harus melek bahwa Tingkat sukses Pendidikan bukan hanya soal turunnya angka Buta huruf.

Berdasarkan tabel 1.6 dan tabel 1.7 dimulai pada tahun 2017 hingga 2021 jumlah keseluruhan penduduk kabupaten Sarolangun 304971 orang, dan lulusan SD berjumlah 58 orang dengan persentase 0,097%, lulusan SMP berjumlah 135 orang dengan persentase 0.223%, lulusan SMA berjumlah 4057 orang dengan persentase 6.67 %, lulusan Diploma I, II, III sebanyak 3083 orang dengan persentase 4.99 %, dan lulusan Sarjana/ Doktor sebanyak 11032 orang dengan persentase 17.98%. Sedangkan fenomena di tahun 2022 mengenai pendidikan di Kabupaten Sarolangun bisa dikatakan pendidikan di sarolangun sekarang sudah lebih baik, terlebih dengan hadirnya teknologi yang semakin canggih dan siswa siswi sudah lebih efektif dan efisien dalam dunia Pendidikan Kenaikan upah minimum buruh sebesar rata-rata 1,09% pada 2022 yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan diprotes para buruh karena dianggap terlalu kecil dan tak cukup untuk kebutuhan hidup layak. Menanggapi kebijakan itu, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Sekitar 2 juta buruh di 30 provinsi, akan mengikuti unjuk rasa nasional tersebut. Selain menuntut kenaikan UMP atau UMK 2022 sebesar 7-10 persen.

Penetapan upah minimum Provinsi akan dilakukan sesuai dengan formulasi yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Upah minimum di Provinsi Jambi pada tahun 2022 ditetapkan Rp. 2.649.034 atau naik 0,72 persen dari tahun sebelumnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Jambi sebesar 5,09% pada 2021. Jumlah tersebut turun 0,04 poin dibandingkan tahun lalu yang sebesar 5,13%. Berdasarkan kabupaten/kota, Kota Jambi menjadi wilayah yang memiliki TPT tertinggi di Provinsi Jambi sebesar 10,66%.

Posisinya disusul Kabupaten Bungo dengan TPT sebesar 5,86%. Kemudian, Kabupaten Muaro Jambi berada di urutan ketiga dengan TPT sebesar 5,59%. Disusul Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin memiliki TPT masing-masing sebesar 5,52% dan 4,83%. Sementara, TPT terendah dimiliki Kabupaten Tanjab Timur yang hanya memiliki TPT 1,56%. Di atasnya ada Kabupaten Kerinci dengan TPT sebesar 2,32%. Jumlah pengangguran terbuka

di Provinsi Jambi sebanyak 93,76 ribu penduduk pada 2021. Jumlah tersebut berkurang 0,25% dari tahun lalu yang sebanyak 93,99 ribu penduduk.

Data tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sarolangun tahun 2021 adalah sebesar 5,09 persen yang mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2020 dan meningkat dibandingkan tahun 2019. TPT di tahun 2020 adalah sebesar 5,13 persen sedangkan di tahun 2019 sebesar 4,19 persen. Pengangguran dalam catatan BPS merupakan penduduk berusia 15 tahun keatas yang tidak punya pekerjaan namun sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin bisa mendapatkan pekerjaan. Selain itu penduduk yang sudah punya pekerjaan namun belum mulai bekerja. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase dari jumlah pengangguran dibagi dengan jumlah angkatan kerja. Selanjutnya untuk TPT di masing-masing kabupaten-kota juga mengalami fluktuasi selama periode tahun 2019-2021. TPT di Kerinci tercatat sebesar 2,32 persen; Merangin 4,83; Sarolangun 5,52; Kota Jambi 10,66; dan Sungai Penuh 3,00 persen. Sedangkan untuk TPT tahun 2020 di Kerinci 2,43 persen; Sarolangun 5,71; Kota Jambi 10,49; dan Sungai Penuh 5,56 persen. Selanjutnya pada 2019 TPT untuk masing-masing kabupaten/kota tercatat di Kerinci sebanyak 2,62 persen; Merangin 3,68; Sarolangun 4,09; Kota Jambi 6,53; dan Sungai Penuh 4,00 persen. Statistik Sosial BPS Provinsi Jambi berujar bahwa Sakernas untuk mendata ketenagakerjaan yang dilakukan rutin itu dilakukan tiap bulan Februari dan Agustus.

Kesimpulan dari fenomena latar belakang diatas yaitu minimnya pengertian soal pentingnya pendidikan di masyarakat Sarolangun mempengaruhi terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sarolangun, atau berdasarkan penetapan Kementerian Ketenagakerjaan mengenai upah minimum diprotes para buruh karena dianggap terlalu kecil dan tak cukup untuk kebutuhan hidup layak sehingga mempengaruhi terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sarolangun, atau pengangguran terbuka dalam catatan BPS yaitu penduduk berusia 15 tahun keatas yang tidak punya pekerjaan namun sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin bisa mendapatkan pekerjaan sehingga mempengaruhi terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sarolangun.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Pertumbuhan Ekonomi**

#### **Pengertian Pembangunan Ekonomi**

Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi dengan perubahan. Dalam literatur ekonomi, pertumbuhan ekonomi secara umum didefinisikan sebagai perekonomian suatu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pembangunan ekonomi sebagai proses pembangunan yang dilakukan oleh negara/daerah untuk mensukseskan warga/penduduk daerah setempat.

Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan, sedangkan pembangunan itu sendiri dapat diartikan sebagai proses multidimensi yang melibatkan perubahan besar dalam struktur sosial, kebiasaan sikap mental dan kelembagaan nasional, termasuk percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan atau penghapusan kemiskinan absolut.

### **Upah Minimum**

Upah Minimum adalah suatu penerimaan bulanan minimum (terendah) sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya. Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 upah minimum dapat ditetapkan secara minimum regional, sektoral regional maupun subsektoral, meskipun saat ini baru upah minimum regional yang dimiliki oleh setiap daerah.

### **Kemiskinan**

Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarga, baik dari segi makanan maupun non makanan. Kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan bisa disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang ada, baik lewat jalur pendidikan formal maupun nonformal yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya pendidikan informal.

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

1. Lokasi yang diambil untuk melakukan penelitian ini yaitu di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.
2. Waktu penelitian ini dilakukan terhitung sejak keluarnya pra-riset sampai dengan selesai.

### **B. Jenis dan Sumber Data**

#### **1. Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh berdasarkan pengukuran secara langsung oleh peneliti dari sumbernya (subyek penelitian). Dikatakan primer, karena dalam penelitian ini data yang dibutuhkan berupa tanggapan responden mengenai pengaruh tingkat pendidikan, upah minimum dan pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten sehingga data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber utama atau tempat objek penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini data diperoleh dari masyarakat Sarolangun sebanyak 100 responden.

#### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas dua, yaitu data primer dan data sekunder antara lain:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Hal ini dikategorikan sebagai sumber data primer melalui kuesioner
- b. Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau yang digunakan oleh organisasi bukan pengolahnya. Pada penelitian ini sumber data sekunder berasal dari literatur-literatur tentang masalah yang akan diteliti, seperti buku, jurnal, atau karya lainnya yang relevan dengan tema penelitian.

### **C. Populasi dan Sampel**

#### **1. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dari penelitian ini adalah jumlah data penduduk Kabupaten Sarolangun tahun 2022 sebanyak 298.091 orang bersumber pada data BPS Sarolangun.



## 2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel pada penelitian ini diambil dari seluruh populasi pada penelitian yaitu sebanyak 100 orang.

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik dan kualitas yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian. Jumlah populasi adalah 298.091 orang, populasi didapatkan dari jumlah data penduduk Kabupaten Sarolangun tahun 2022 Kabupaten Sarolangun.

Angka yang digunakan didapatkan adalah hasil dari perhitungan dengan rumus *Yamane*, yaitu:

$$n = \frac{N}{N.d^2+1}$$

Keterangan:

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi = 298.091 populasi

d<sup>2</sup> = Presisi yang ditetapkan =10%

1 = Angka Konstan

$$n = \frac{N}{N.d^2+1}$$

$$n = \frac{298.091}{298.091*0,1^2+1} \quad n = \frac{298.091}{298.091*0,01+1} \quad n = \frac{298.091}{2.981,91} \quad n = 99,97 \text{ dibulatkan menjadi } 100 \text{ responden.}$$

Dari hasil penghitungan rumus diatas, maka sampel penelitian ini adalah 100 responden.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara tingkat pendidikan dengan tingkat kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang diberikan maka akan semakin meningkatkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Sarolangun. Sehingga tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sarolangun. Tingkat Pendidikan memiliki kontribusi positif terhadap tingkat kemiskinan terutama tingkat pendidikan yang rendah sehingga sulitnya mendapatkan pekerjaan dan tingkat pendidikan yang tinggi memiliki

kemampuan yang baik tetapi mengembangkan di luar Kabupaten Sarolangun. Pada tabel 4.10 diperoleh hasil nilai signifikansi 0.038. hasil perhitungan tersebut menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan dengan nilai signifikan yang lebih kecil dari nilai probabilitas ( $0.038 < 0.05$ ) yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Darussamin.

Penelitian Darussamin, Darussamin (2016) memiliki hasil adalah bahwa variabel pertumbuhan PDRB, pendidikan, dan tingkat pengangguran secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sumatera Selatan. Oleh karenanya perkembangan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan tingkat pengangguran patut menjadi pertimbangan untuk mengatasi masalah kemiskinan. PDRB berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, dan pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suropto, Lalu Subayil, 2020 yaitu Variabel Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

## **2. Pengaruh Tingkat Upah Minimum Terhadap Tingkat Kemiskinan**

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara tingkat upah minimum dengan tingkat kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat upah minimum yang diberikan maka akan semakin meningkatkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Sarolangun. Sehingga tingkat upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sarolangun. Tingkat upah minimum memiliki kontribusi positif terhadap tingkat kemiskinan terutama tingkat upah minimum yang rendah sehingga sulitnya mencukupkan kebutuhan sehari-hari dan tingkat upah minimum yang tinggi memiliki kemampuan yang baik tetapi mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Sarolangun. Pada tabel 4.10 diperoleh hasil nilai signifikansi 0.014. hasil perhitungan tersebut menyatakan bahwa tingkat upah minimum berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan dengan nilai signifikan yang lebih kecil dari nilai probabilitas ( $0.014 < 0.05$ ).

Penelitian yang dilakukan oleh Erliza Millenia Putri, dan Dewi Zaini Putri memiliki hasil Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) upah minimum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan (2) tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, (3) pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, dan (4) pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Berbanding terbalik dengan penelitian dari A'ing Gung, Eny Rochaida, Fitriadi Fitriadi yang memiliki hasil penelitian (1) Upah minimum berpengaruh

negatif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka, sementara pendidikan justru berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka, sementara tingkat inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengangguran terbuka; (2) Pengangguran terbuka justru berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kemiskinan; serta (3) Upah minimum berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan melalui pengangguran terbuka, sedangkan pendidikan dan tingkat inflasi sama-sama berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan melalui pengangguran terbuka.

### **3. Pengaruh Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan**

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh positif antara pengangguran terbuka dengan tingkat kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi pengangguran terbuka yang diberikan maka akan semakin meningkatkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Sarolangun. Sehingga pengangguran terbuka tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sarolangun. Pengangguran terbuka memiliki kontribusi positif terhadap tingkat kemiskinan terutama pengangguran terbuka yang rendah sehingga banyaknya masyarakat Kabupaten Sarolangun yang sudah berkerja dan pengangguran terbuka yang tinggi memiliki kemampuan yang kurang baik karena meningkatkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Sarolangun. Pada tabel 4.10 diperoleh hasil nilai signifikansi 0.386. hasil perhitungan tersebut menyatakan bahwa pengangguran terbuka tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan dengan nilai signifikan yang lebih besar dari nilai probabilitas ( $0.386 < 0.05$ ).

Penelitian yang dilakukan oleh Alifah, dan Khindya memiliki hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel tingkat pendidikan, upah minimum, dan tingkat pengangguran terbuka mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan sebagian tingkat pendidikan dan upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta, tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Suropto, dan Lalu Subayil membahas variabel pengangguran tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dari penelitian ini, yaitu:

1. Ada pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sarolangun secara bersama-sama.
2. Ada pengaruh tingkat upah minimum terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sarolangun secara bersama-sama.
3. Tidak ada pengaruh pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sarolangun secara bersama-sama.

### **B. Saran**

Adapun saran dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk meningkatkan dari segi pendidikan agar mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Sarolangun.
2. Untuk meningkatkan dari segi upah minimum seimbangi dengan kebutuhan pokok dibanding kebutuhan parsial sehingga kebutuhan pokok sehari-hari tercukup dan mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Sarolangun.
3. Untuk pengangguran terbuka lebih aktif dalam meningkatkan kerja sama secara freelance sehingga mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Sarolangun.

## **DAFTAR REFERENSI**

### **Buku**

- Amalia, F., Sinaga, R., Soeyatno, R. F., Silitonga, D., Solikin, A., Hubbansyah, A. K., ... & Ladjin, N. *Ekonomi Pembangunan*. Penerbit Widina. 2022.
- Amiruddin, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006).
- Elvera, Yesita Astarina. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi. 2021
- Fitri Amalia, dkk. *Ekonomi Pembangunan*. Bandung: Widina. 2022
- Hasan. M & M. Azis. *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Lokal. Edisi Kedua*. Makasar: CV. Nur Lina. 2018.
- Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018)
- Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010).
- Mustari, M., & Rahman, M. T. *Manajemen pendidikan*. Jakarta: RajaGraфика Persada. 2014.
- Purba, B., Rahmadana, M. F., Basmar, E., Sari, D. P., Klara, A., Damanik, D., ... & Nugraha, N. A. *Ekonomi Pembangunan*. Yayasan Kita Menulis. 2021.

- Sandu Siyoto, Ali Sodik, “*Dasar Metodologi Penelitian*” (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015)
- Soeratno dan Lincolin Arsyad, *Metodologi Penelitian untuk Ekonomidan Bisnis*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2008)
- Wardis Girsang, *Kemiskinan Multidimensional di Pulau-Pulau Kecil*. Ambon: Universitas Pattimura. 2011.
- Zulfikar Putra, S. H., Darmawan Wiridin, S. H., & Wajdi, H. F. *Implementasi Upah Minimum Terhadap Kesejahteraan Pekerja*. Kota Malang: Ahlimedia Book. 2022

### **Jurnal & Karya Ilmiah**

- Alifah, K. (2022). *Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Upah Minimum, &Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta* (Doctoral Dissertation, Upn Veteran Jawa Timur).
- Ariasih, N. L. M., & Yuliarmi, N. N. (2021). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan dan Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 1(7), 821-839.
- Budhijana, R. B. (2020). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Index Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2000-2017. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan (Journal of Economics, Management and Banking)*, 5(1).
- Chalid, N., & Yusuf, Y. (2014). Pengaruh tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, upah minimum kabupaten/kota dan laju pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau. *Jurnal ekonomi*, 22(2), 1-12.
- Darussamin, D. (2016). *Analisis Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2004-2013 (Skripsi)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Fatah Palembang)
- Irwan, Misbach. “Pengukuran Dalam Penelitian Sosial: Menghubungkan Konsep Dengan Realitas”, *Jurnal Berita Sosial*, Edisi 1 2013
- Laksono, W. A. (2021). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Bogor Tahun 2010-2020* (Doctoral dissertation, Universitas Siliwangi).
- Maratade, S. Y. (2016). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sulawesi Utara (Studi Pada Tahun 2002-2013). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(1).
- Putri, E. M., & Putri, D. Z. (2021). Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendidikan Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan*, 10(2), 106-114
- Rochaida, E., & Fitriadi, F. (2020). Pengaruh upah minimum dan pendidikan serta tingkat inflasi terhadap pengangguran terbuka dan kemiskinan antar provinsi di pulau kalimantan. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)*, 4(4).
- Romi, S., & Umiyati, E. (2018). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan upah minimum terhadap kemiskinan di Kota Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 7(1), 1-7.

- Sangereng, W., Engka, D. S., & Sumual, J. I. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(04).
- Saputra, B., & Harahap, E. F. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi, Tingkat Kemiskinan dan Pendidikan terhadap Pengangguran di Sumatera Barat. *Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Economics, Bung Hatta University*, 13(3).
- Suripto, S., & Subayil, L. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Di Yogyakarta Priode 2010-2017. *GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 127-143.
- Zainuri, A., & Jamal, A. (2017). Disparitas Pembangunan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 1-10.

### **Website**

- Annisa Mutia, Tingkat Pengangguran Terbuka di Jambi Capai 5,09% pada 2021 diakses pada situs <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/27/tingkat-pengangguran-terbuka-di-jambi-capai-509-pada-2021> pada tanggal 09 november 2022.
- BBC News Indonesia. Upah minimum buruh: Kelompok buruh berencana demo dan mogok nasional tolak formula kenaikan UMP 2022 versi Menaker yang tak cukup penuhi kebutuhan layak diakses situs yang beralamat: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59310358> pada tanggal 09 november 2022
- Hayatullah Qomainy. Harlah Sarolangun Ke 23 Tahun, Mahasiswa: Ini Momentum Pemerintah Melek dengan Era Pembangunan Sinergi-Kolaborasi. Wahana News Jambi.co dapat diakses situs yang beralamat: <https://jambi.wahananews.co/utama/hari-jadi-sarolangun-ke-23-tahunmahasiswa-ini-momentum-pemerintahan-sarolangun-harus-melek-denganera-pembangunan-sinergi-kolaborasi-mcKnHdW0e1> pada tanggal 14 November 2022
- Nanang Mairiadi, Disnakertrans Jambi bahas kenaikan upah minimum, diakses situs yang beralamat: <https://jambi.antaraneews.com/berita/528161/disnakertrans-jambi-bahas-kenaikan-upah-minimum> pada tanggal 14 November 2022
- Rara Khushshoh Azzahro. BPS Catat Tingkat Pengangguran di Provinsi Jambi Menurun dalam Tiga Tahun Terakhir. TribunJambi.com dapat akses disitus yang beralamatkan: <https://jambi.tribunnews.com/2022/09/23/bps-catattingkat-pengangguran-di-provinsi-jambi-menurun-dalam-tiga-tahunterakhir> pada tanggal 14 November 2022
- Teguh Suprayitno. Rata-rata Masa Sekolah di Sarolangun Hanya 7,34 Tahun Hingga Kelas 2 SMP diakses situs <https://jambi.tribunnews.com/2018/03/27/rata-rata-masa-sekolah-di-sarolangun-hanya-734-tahunhingga-kelas-2-smp> pada tanggal 09 November 2022